

A. Latar Belakang

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan tentu membutuhkan berbagai sumber daya. Sumber daya yang ada tidak akan berarti apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk mengelolanya, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam kelangsungan lembaga pemerintahan, karena memiliki tenaga, pikiran dan kreatifitas yang sangat dibutuhkan oleh lembaga pemerintahan tersebut. Untuk melakukan perubahan kearah yang positif, dibutuhkan manusia-manusia handal. Dalam kepentingannya manusia harus ditata dalam sebuah manajemen yaitu manajemen sumber daya manusia (MSDM).

Seperti yang diketahui bahwa manusia merupakan sumber daya penggerak lembaga pemerintahan dan berperan untuk menentukan berhasil atau tidaknya tujuan lembaga pemerintahan tersebut. Sumber daya manusia atau disebut pegawai berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian organisasi agar lembaga pemerintahan mencapai visi dan misi dengan baik.

Kenyataan di zaman modern ini, kondisi disiplin pegawai perlu ditingkatkan. Terbukti dari terus berlangsungnya berbagai macam perilaku yang menyimpang dan melanggar hukum dan norma yang berlaku dalam bentuk sikap dan tindakan yang kurang patuh dan tertib. Hal ini terjadi karena kurangnya kedisiplinan dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan lingkungan di mana ia berada.

Kurangnya disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan tidak terkecuali pula di kantor pemerintah yang merupakan pelaksanaan utama pemerintah dan pembangunan nasional. Ketaatan terhadap peraturan kurang dilaksanakan secara sadar, ikhlas dan lahir batin, sehingga tercermin sikap dan perilaku yang kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang dapat

berperan utama dalam proses perkembangan budaya disiplin ini adalah sumber daya manusia yang ada didalam instansi atau kantor tersebut.

Untuk lebih mengembangkan peran ini, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan agar meningkatkan kualitas aparatur untuk lebih bersikap arif dan bijaksana serta berdedikasi yang tinggi terhadap pengabdian, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Demikian keberadaan aparat/pegawai sebagai satu kesatuan dalam perangkat pemerintahan daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud adalah:

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki tingkat kedisiplinan sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.

Dengan pembinaan disiplin kerja yang terus menerus dengan upaya yang strategis, diharapkan setiap pegawai tidak melakukan disiplin karena takut kepada pimpinan atau takut pada sanksi yang akan diterima, akan tetapi diharapkan setiap pegawai berdisiplin karena adanya dorongan dan kesadaran diri, sehingga disiplin itu sendiri akan tetap berjalan sesuai dengan perkembangan program dan beban kerja organisasi.

Mengingat tugas pokok dan fungsi Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sangat kompleks, maka menjadi sebuah keharusan untuk memiliki dukungan kualitas sumber daya aparatur. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai disiplin tinggi karena dengan disiplin akan dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Dengan adanya kedisiplinan pegawai yang mencerminkan kesanggupan pegawai tersebut dalam mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka diharapkan sikap dan perilaku pegawai tidak akan jauh melenceng dari semangat pengabdian, kejujuran, tangguh jawab, disiplin serta wibawa sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 15 Juni 2015 yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan masih adanya pegawai yang masih kurang profesional seperti seringnya ada pegawai yang datang terlambat, istirahat sebelum waktunya, alpa tanpa pemberitahuan, meninggalkan tempat kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggung jawaban, pulang sebelum waktunya, dan lain-lain., maka dari itu tujuan dari penelitian ini agar mengetahui kekurangankedisiplinan pegawai tersebut yang masih sering pegawai jadikan budaya kerja dalam suatu instansi.

Seperti yang diketahui dengan aturan disiplin PNS yaitu setiap PNS harus mematuhi aturan organisasi yang mengatur tentang sistem kerja pada setiap instansi baik yang mengatur kerja, apel kerja, pakaian kerja, ijin, cuty, tugas dinas dan sebagainya. Aturan ini dibuat untuk mengatur sistem kerja agar kegiatan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik serta tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik.

Berdasarkan observasi tersebut diatas, tentu sangat mengganggu sistem kerja yang tentunya akan mempengaruhi kinerja suatu kantor. Bahkan, sebenarnya diluar kedinasan setiap PNS harus tetap menjaga martabak dengan tetap menunjukkan pola sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kode etik PNS. Hal ini sangat penting, karena diluar kedinasan itu setiap PNS akan berintegrasidengan anggota masyarakat lainnya dan diri sendiri sebagai warga masyarakat yang

memiliki jati diri sebagai Pegawai Negeri Sipil meskipun sudah ada slogan yang mengingatkan pegawai untuk bersikap malu.

Fokus penelitian ini, dengan naik turunnya kinerja pegawai disebabkan adanya budaya organisasi yang kurang baik, pegawai yang kurang disiplin dalam melaksanakan pekerjaan, tingkat ketidakhadiran selalu naik dan semangat kerja yang menurun. Kondisi ini mengakibatkan Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel sulit untuk berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menganalisis Budaya Disiplin Kerja Pegawai pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana gambaran efektifitas budaya disiplin kerja pegawai pada Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektifitas budaya disiplin kerja pegawai Pada Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah :

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan referensi sederhana bagi UNM, khususnya Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial UNM dan sebagai pengalaman yang sangat berharga bagi peneliti mengingat peneliti adalah pemula dalam usaha menemukan dan menjawab permasalahan-

pemasalahan budaya disiplin kerja pegawai pada Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

- 2) Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengukur dan mempertimbangkan seberapa besar efektivitas pelaksanaan budaya disiplin kerja pegawai.
- 3) Secara metodologis, dapat menjadikan kajian dalam rangka pengembangan metode riset selanjutnya, dan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin memperdalam kajian tentang budaya disiplin kerja pegawai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pembahasan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pelaksanaan kedisiplinan pegawai pada kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel dilihat dari aspek ketetapan waktu, menggunakan peralatan kantor dengan baik, tanggung jawab yang tinggi, dan ketaatan terhadap aturan kantor dapat dikatakan sudah berjalan efektif, walau demikian masih terdapat sebagian pegawai yang terkadang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan kedisiplinan yang telah ditetapkan, dan telah di upayakan berbagai pendekatan untuk meminimalisir tindakan indisipliner dari pegawai tersebut.

Pelaksanaan budaya disiplin kerja pegawai pada Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel dilihat dari indikator-indikator yang ada dapat dikatakan secara efektif, walau sebagian masih terdapat pegawai terkadang tidak mengindahkan peraturan-peraturan kedisiplinan yang telah ditetapkan, dan telah diupayakan berbagai pendekatan untuk meminimalisir tindakan disiplin dari pegawai tersebut.

Untuk memaksimalkan penerapan disiplin pegawai, maka Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel, telah melakukan upaya sosialisasi tentang aturan disiplin PNS, memberikan keteladanan kepemimpinan yang baik, memasang spanduk Budaya Malu, mengoptimalkan pemberian *reward* dan *Punishmen*, memberikan rasa keadilan antara pegawai, pemberian motivasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai, peningkatan sarana dan prasarana kerja dan penciptaan lingkungan kerja yang nyaman.

